



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : LEGISLATIF
LEMBAGA : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TOPAN ALI AKBAR**
2. Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD**
3. NHK : **957577**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.140.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 924 m2/418 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 3.800.000.000
2. Tanah Seluas 9.644 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah Seluas 1.749 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. Tanah Seluas 8.150 m2 di KAB / KOTA KAPUAS HULU, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
5. Tanah Seluas 380 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
6. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
7. Tanah Seluas 190 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
8. Tanah Seluas 599 m2 di KAB / KOTA KOTA PONTIANAK , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **180.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA HILUX 2.4E EXTRA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **----**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	15.498.982
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	5.335.498.982
III. HUTANG	Rp.	729.753.104
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.605.745.878

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.